



PT. BPR BKK JATENG
(PERSERODA)

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2023

🏠 Jl. Tanjung No.11 A Kota Semarang, Kota Semarang
☎ (024) 86405241
📠 (024) 86405241



OTORITAS
JASA
KEUANGAN





PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132 Telp. (024) 864 03887, 860 42409
www.bkkjateng.co.id | E-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
Alamat : Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132
Nomor Telepon : (024) 864 03887, 860 42409
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp367.850.000.000,00
Total Aset : Rp2.421.563.418.343,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar **2,9** dengan predikat **Cukup Baik**.
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No	Faktor yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (20%)	0,200	Cukup Baik	2,90
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (1,25%)	0,125	Cukup Baik	3,03
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite (2,5%)	0,025	Cukup Baik	3,00
4	Penanganan benturan kepentingan (10%)	0,100	Cukup Baik	3,00
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR (10%)	0,100	Cukup Baik	3,00
6	Penerapan fungsi audit intern (10%)	0,100	Baik	2,63
7	Penerapan fungsi audit ekstern (2,5%)	0,025	Baik	2,30
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*) (10%)	0,100	Cukup Baik	2,67
9	Batas maksimum pemberian kredit (7,5%)	0,075	Cukup Baik	2,90
10	Rencana bisnis BPR (7,5%)	0,075	Cukup Baik	3,10
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan (7,5%)	0,075	Cukup Baik	2,80
Nilai Komposit			2,90	
Predikat Komposit			Cukup Baik	



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132 Telp. (024) 864 03887, 860 42409
www.bkkjateng.co.id | E-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.90)

Struktur dan infrastruktur tata kelola cukup baik, dari jumlah anggota Direksi terpenuhi 3 (tiga) dari seharusnya 4 (empat) terdapat kekosongan Direktur Kepatuhan setelah ada perubahan komposisi Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Pemasaran dikarenakan posisi Direktur Pemasaran sebelumnya mengundurkan diri. Persyaratan lainnya untuk kriteria, integritas, kompetensi dan reputasi anggota direksi telah terpenuhi. Penyampaian laporan penerapan tata kelola akan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan Asosiasi BPR serta akan dipublikasikan pada media dan/atau laman PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 3,03)

Secara umum telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penilaian penerapan tata kelola. Dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar) bank seharusnya memiliki paling sedikit 3 orang Dewan Komisaris sedangkan saat ini bank memiliki 4 orang anggota Dewan Komisaris. Saat ini jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang. Berdasarkan struktur tata kelola bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H: 3.00)

Bank sudah memiliki fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016, bagi BPR yang memiliki modal inti diatas Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dengan keanggotaan masing-masing komite merangkap anggota komite lainnya dan Dewan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.00)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, bank senantiasa memonitoring pencegahan adanya benturan kepentingan. Sehingga sampai dengan posisi Desember 2023 belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh seluruh organ organisasi bank, termasuk tidak ada pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan bank.



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132 Telp. (024) 864 03887, 860 42409
www.bkkjateng.co.id | E-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.00)

Saat ini Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terisi secara definitif dan masih dijabat oleh Direktur Operasional sebagai pejabat sementara. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan bank telah melaksanakan proses penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan dengan modal inti diatas Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) bank juga sudah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + : 2.53)

Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional bank, dan telah melaporkan setiap hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan modal inti diatas Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), bank telah menugaskan kepada pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang standart pelaksanaan audit intern pada tanggal 30 Desember 2022 dan telah melaporkan hasil kaji ulang dari pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + : 2.30)

Penugasan audit laporan keuangan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik. Penunjukan audit telah disetujui dalam RUPS sesuai usulan Dewan Komisaris. Hasil dari pelaksanaan audit dan manajemen letter telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan POJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + : 2.67)

Dengan modal inti diatas Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan telah melaksanakan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. Bank telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan POJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + : 2.90)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK, dan laporan BMPK telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132 Telp. (024) 864 03887, 860 42409
www.bkkjateng.co.id | E-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama periode laporan, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + : 3,10)

Rencana bisnis bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi bank, serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Rencana bisnis menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dengan cakupan sesuai ketentuan POJK Nomor 15/POJK.03/2021, sedangkan pelaksanaan rencana bisnis dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + : 2,80)

Bank memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, dan telah membuat dan melaporkan laporan publikasi mencakup laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham. Bank telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik, aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai ketentuan POJK.

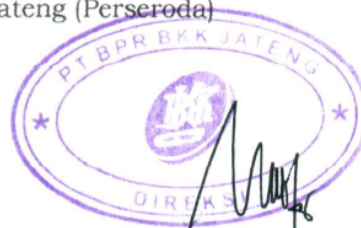
C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan dari 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, tidak terdapat faktor yang seluruh indikatornya mendapatkan nilai tidak baik (5). Maka berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Bab VI butir 7, peringkat komposit adalah Cukup Baik. Bank secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawab, independensi dan kewajaran. Namun demikian Bank menyadari bahwa masih harus melakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola benar-benar dapat dipenuhi dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank.

Semarang, 29 Januari 2024
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



Eddy S. Bramiyanto, SE., MM.
Komisaris Utama



H. Koesnanto, SH., M.Kn
Direktur Utama

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola bank telah merujuk pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Laporan publikasi posisi 31-12 -2023 total Asset sebesar Rp2.476.818.117.667,00, Modal Inti sebesar Rp430.229.131.791,00. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha untuk menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Bkk Jateng (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Bkk Jateng (perseroda) beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder, meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja dan meminimalisasi risiko benturan kepentingan, meningkatkan efisiensi operasional bank, mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan risiko secara lebih efektif.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku dan dikomunikasikan kepada stakeholders terkait yang berhak memperoleh informasi.

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.

5 Fairness

Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan berdaya saing.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : KOESNANTO, S.H., M.Kn. Jabatan : 0100 - Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab : a. Penentuan kebijakan umum dan memimpin Perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum, serta bisnis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank c. Pelaksanaan kepengurusan harta kekayaan Perusahaan dan mengelola transaksi atau hubungan usaha dan keuangan Perusahaan d. Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi penyediaan system pengelolaan pengamanan teknologi informasi e. Penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai yang dapat mendukung perkembangan usaha tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan Perusahaan kepada nasabah f. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun, bersama-sama dengan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris g. Penyusunan struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan; h. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) i. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Komisaris j. Pengendalian dan pengawasan pemberian kredit, pendanaan, operasional dan pengelolaan sumber daya manusia k. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku l. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dan karyawan dalam rangka penyusunan rencana kerja, penyusunan peraturan Perusahaan dan pedoman operasional Perusahaan m. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat dan karyawan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam

		operasional Perusahaan baik dalam hal pemasaran maupun operasional layanan perbankan yang lain agar sesuai dengan visi misi Perusahaan, n. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja PT BPR BKK JATENG (Perseroda) kepada OJK Pemegang Saham atau Otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DRAJAT ADHITYA WALDI, S.E., M.M.
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Membantu Direktur Utama dalam menentukan kebijakan umum untuk mencapai tujuan Perusahaan b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang administrasi keuangan, operasional, kepegawaian dan umum dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank c. Pelaksanaan kepengurusan harta kekayaan Perusahaan dan mengelola transaksi atau hubungan usaha dan keuangan Perusahaan d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun bersama sama dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya e. Penyusunan rencana struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan f. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Komisaris g. Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi penyediaan system pengelolaan pengamanan teknologi informasi h. Penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai yang dapat mendukung perkembangan usaha tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan Perusahaan kepada nasabah i. Pengendalian dan pengawasan pendanaan operasional dan pengelolaan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya j. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku k. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana kerja.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SARWINI SUPRIATI, S.E.
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Membantu Direktur Utama dalam menentukan kebijakan umum untuk mencapai tujuan Perusahaan

	b. Penyusunan kebijakan Perusahaan dibidang pemasaran dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan dan perubahannya setiap tahun bersama sama dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya d. Pelaksanaan pencapaian rencana kerja dan anggaran pemasaran yang telah disetujui Dewan Komisaris e. Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranya kegiatan Pemasaran yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku f. Penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran dana dengan penerapan prinsip kehati hatian untuk menjaga performa kualitas dan kuantitas asset produktif dalam rangka optimalisasi pendapatan Perusahaan dan efektifitas biaya g. Penyelenggaraan koordinasi, arahan, dan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran kredit sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) dan Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian h. Penyelenggaraan koordinasi, arahan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, AYDA dan dan hapus buku i. Penyelenggaraan evaluasi dan pengembangan terhadap produk dan layanan Perusahaan demi terciptanya tingkat daya saing dalam pemasaran.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
1.	Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2.	Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3.	Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
4.	Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
5.	Direksi telah memberikan perhatian kepada proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
6.	Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: EDDY S. BRAMIYANTO, S.E., M.M.
	Jabatan	: Komisaris Utama

	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan dan peraturan yang berlaku b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. Memberikan saran, masukan, nasehat dan evaluasi atas kinerja Direksi dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pencapaian Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi misi perusahaan d. Memberikan arahan dan pemantauan terhadap rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang meliputi perubahan signifikan konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti perbankan, pengadaan aplikasi inti baru dan kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi e. Memberikan masukan dan nasehat kepada Direksi dan manajemen dalam rangka pembuatan hukum yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan f. Membuat dan melaporkan hasil pengawasan kepada OJK dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku g. Menyusun jadwal, menentukan agenda, mengundang dan memimpin rapat Dewan Komisaris
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: Drs. BUDI SUSETYONO, MPA.
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. Memberikan saran, masukan, nasehat dan evaluasi atas kinerja Direksi dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pencapaian Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi misi perusahaan d. Memberikan masukan dan nasehat kepada Direksi dan manajemen dalam rangka pembuatan hukum yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: FAHMI AKBAR IDRIES
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:

		a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. Memberikan saran, masukan, nasehat dan evaluasi atas kinerja Direksi dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pencapaian Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi misi perusahaan d. Memberikan masukan dan nasehat kepada Direksi dalam rangka pembuatan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan e. Memastikan Perusahaan memiliki sistem informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik f. Memastikan Perusahaan mematuhi seluruh ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional g. Memastikan risiko dan potensi krisis diidentifikasi dan dikelola dengan baik h. Memastikan Perusahaan mengangkat pejabat eksekutif yang professional i. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik Good Corporate Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: HERU SUPRIHATI
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi c. Memberikan saran, masukan, nasehat dan evaluasi atas kinerja Direksi dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pencapaian Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi misi perusahaan d. Memberikan masukan dan nasehat kepada Direksi dalam rangka pembuatan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan e. Memastikan Perusahaan memiliki sistem informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik f. Memastikan Perusahaan mematuhi seluruh ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional g. Memastikan risiko dan potensi krisis diidentifikasi dan dikelola dengan baik

	h. Memastikan Perusahaan mengangkat pejabat eksekutif yang profesional i. Memastikan prinsip prinsip dan praktik Good Corporate Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik
Rekomendasi Kepada Direksi	
1.	Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2.	Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3.	Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan 4. kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
4.	Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
5.	Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.
6.	Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.
7.	Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau otoritas lain. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

		Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi setiap anggota Komite. Menyusun Laporan Komite Audit sesuai ketentuan. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPR.
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab	:Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan penerapan manajemen risiko serta pemantauan atas tindak lanjut hasil atas opini dari Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan : - Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi setiap anggota Komite. Menyusun Laporan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPR.
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab	:Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi terhadap : - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan - Prestasi kerja individual - Kewajaran dengan peer group - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi setiap anggota Komite. Menyusun Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai ketentuan. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPR.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	GEDE SUJANA, SE	Bidang Audit	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
1	ARIF SUWASONO, SE., MM	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
1	M. AGUNG SURYAATMAJA	Bidang Audit	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
1	ENI MARHAENNINGSIH	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak Menjabat	Ya
1	SAIFUL AZIS NASUTION	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	FAHMY AKBAR IDRIES	Bidang Audit	Ketua	Tidak Menjabat	Ketua	Ya
1	HERU SUPRIHATI	Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak Menjabat	Ya
1	BUDI SUSETYONO	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : Penelaahan keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik Realisasi : Penentuan AP/KAP wajib mencantumkan CV terkait keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik. Jumlah Rapat : 5
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : Melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Profil Risiko BPR yang sesuai dengan kompleksitas usaha BPR. Realisasi : Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Profil Risiko BPR yang sesuai dengan kompleksitas usaha BPR dengan rekomendasi terlampir. Jumlah Rapat : 15
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : Penelaahan dan pemberian rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris /Direksi/Pejabat Eksekutif BPR kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Realisasi : Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan telaah dan memberikan rekomendasi/ usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris/ Direksi/ Pejabat Eksekutif BPR kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai rekomendasi terlampir. Jumlah Rapat : 1

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	KOESNANTO, S.H., M.Kn.	-	-
2	DRAJAT ADHITYA WALDI, S.E., M.M.	-	-
3	SARWINI SUPRIATI, S.E.	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KOESNANTO, S.H., M.Kn.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRAJAT ADHITYA WALDI, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	SARWINI SUPRIATI, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	KOESNANTO, S.H., M.Kn.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRAJAT ADHITYA WALDI, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	SARWINI SUPRIATI, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	EDDY S. BRAMIYANTO, S.E., M.M.	-	-
2	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA.	-	-
3	FAHMI AKBAR IDRIES	-	-
4	HERU SUPRIHATI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	EDDY S. BRAMIYANTO, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	FAHMI AKBAR IDRIES	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	HERU SUPRIHATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	EDDY S. BRAMIYANTO, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	FAHMI AKBAR IDRIES	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	HERU SUPRIHATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	2.751.512.940	4	1.439.252.904
2	Tunjangan	3	229.292.745	4	119.937.742
3	Tantiem	3	0	4	0
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	4	0
5	Remunerasi lainnya	3	0	4	0
Total			2.980.805.685		1.559.190.646

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Sewa Rumah Dinas	0
2	Transportasi	Mobil Dinas	0
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	Komunikasi	0

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	11,80	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,90	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-2-10	4	1. Evaluasi Kinerja Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda). 2. Agenda lainnya.
2	2023-3-2	6	Hasil Audiensi dengan OJK terkait Hasil Pemeriksaan KAP Tutup Buku Tahun 2022.
3	2023-3-11	4	1. Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2023. 2. Lain-lain.
4	2023-5-11	4	1. Evaluasi Kinerja Bulan April 2023 2. APU PPT 3. Penerapan Tata Kelola 4. Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI OJK dan KAP 5. Lain-lain.
5	2023-6-2	4	1. Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2023. 2. Manajemen Risiko. 3. Perlindungan Konsumen. 4. Tata Kelola. 5. Anti Fraud. 6. Lain-lain.
6	2023-8-4	4	1. Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2023. 2. Perlindungan Konsumen. 3. APU PPT. 4. Lain lain.
7	2023-9-1	2	Recruitment Anggota Komite Pemantau Risiko
8	2023-9-22	4	1. Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2023 2. Tindak Lanjut Temuan OJK 3. Uji coba penerapan SAK EP 4. Rencana Pembelian Aset Tanah untuk Kantor Pusat 5. Lain Lain
9	2023-10-4	4	Penunjukan KAP Untuk Pelaksanaan Audit Tahun 2023 PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
10	2023-10-31	4	Pembahasan Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK
11	2023-10-31	5	Pertemuan Rutin Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
12	2023-11-17	4	Pembahasan Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK
13	2023-11-17	5	Usulan Strategi dan Anggaran RBB Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2024
14	2023-11-17	5	Pertemuan Rutin Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
15	2023-12-7	4	1. Pembahasan Tindak Lanjut OJK. 2. Pembahasan Penyusunan RBB Tahun 2024. 3. Evaluasi Penerapan APU PPT dan P3SPM. 4. Evaluasi Pengendalian Fraud. 5. Pembahasan Rekomendasi Komite Pemantau Risiko. 6. Perbaikan Profil Risiko. 7. Pembahasan Rekomendasi Komite Audit. 8. Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 9. Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank.
16	2023-12-16	6	Pembahasan Hasil Rapat Pengurus dengan Panitia Pengadaan Tanah

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	EDDY S. BRAMIYANTO, S.E., M.M.	13	3	100,00%
2	Drs. BUDI SUSETYONO, MPA.	13	3	100,00%
3	FAHMI AKBAR IDRIES	13	3	100,00%
4	HERU SUPRIHATI	13	3	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	16	19	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		5		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	1	5	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	5	9	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	148	2
Dalam proses penyelesaian	9	1
Total	157	3

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

M. PENUTUP

Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK Jateng (Perseroda) ini selain untuk keperluan mamtuhi ketentuan Otorotas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja bank dan pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK Jateng (Perseroda). Melalui laporan ini bank ingin menunjukkan hubungan antara manajemen dengan stakeholders, manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

Demikian disampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh terkait pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

Kota Semarang, 29 Januari 2024
Persetujuan Pengurus PT. BPR Bkk Jateng (perseroda)

DEWAN KOMISARIS

Eddy S. Bramiyanto, SE, MM
Komisaris Utama

DIREKSI

Koesnanto, SH, M.Kn
Direktur Utama